

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA SKPD PROVINSI RIAU)

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



OLEH:

GHOZI FERDIANSYAH P
185310333

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ghazi Ferdiansyah P
NPM : 185310333
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Provinsi Riau)

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI


Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI
EMPIRIS PADA SKPD PROVINSI RIAU)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan, pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui salah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 06 April 2022

Yang memberi pernyataan,



Ghozi Ferdiansyah P
NPM: 185310333



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : info@uir.ac.id Website : www.eco.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : GHOZI FERDIANSYAH P
NPM : 185310333
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA SKPD PROVINSI RIAU)

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 24 % pada
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekabaru, 5 April 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor: 1206/Kpts/FE-UIR/2021

TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1 DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-10-22 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode, 2017-2021
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA.	Lektor	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
N a m a : Ghazi Ferdiansyah P
N P M : 185310333
Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Provinsi Riau)
 3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
 4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal: 22 Oktober 2021
Dekan



Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Ghazi Ferdiansyah P
NPM : 185310333
Judul Proposal : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Provinsi Riau).
Pembimbing : 1. Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 08 Desember 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

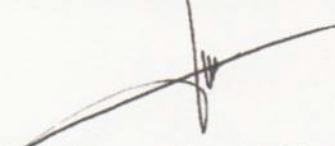
1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	H. Burhanuddin, SE., M.Si	Anggota	2. 
3.	Irena Puspi Hastuti, SE., M.Si	Anggota	3. 

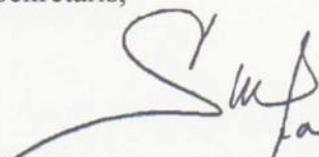
*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 08 Desember 2021
Sekretaris,


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 185310333
 Nama Mahasiswa : GHOZI FERDIANSYAH P
 Dosen Pembimbing : 1. SISKA SE., M.Si., Ak 2.
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA SKPD PROVINSI RIAU)
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : THE IMPACT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCE, THE UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY AND THE APPLIACE OF PUBLIC ACCOUNTING SYSTEM TOWARD QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS (EMPIRICAL STUDY AT DEPARTMENT IN RIAU PROVINCE)
 Lembar Ke :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	18 Oktober 2021	Pengajuan judul penelitian	Sudah diperbaiki	<i>Siska</i>
2	15 November 2021	- Gunakan buku pedoman Penulisan skripsi Fokus ke LKPD - Gunakan pendapat para Ahli - Tabel Penelitian urutkan berdasarkan tahun terbaru	Sudah diperbaiki	<i>Siska</i>
3	22 November 2021	- Jarak baris dalam table penelitian 1 spasi - Cover gunakan 1 spasi	Sudah diperbaiki	<i>Siska</i>
4	29 November 2021	- Periksa lagi antara kuesioner dan indikator	Sudah diperbaiki	<i>Siska</i>
5	1 Desember 2021	Proposal disetujui untuk diseminarkan	Sudah diperbaiki	<i>Siska</i>
6	14 Maret 2022	- Dikata pengantar terimakasih ditujukan untuk unsur kampus: Rektor, Dekan, Ka Prodi, Pembimbing, Dosen dan Karyawan baru kemudian Orang Tua, Keluarga dan Teman - Hasil dari uji deskripsi responden dihubungkan dengan kualitas laporan keuangan - Pengujian secara parsial (uji t) dulu sebelum pengujian secara simultan (uji F)	Sudah diperbaiki	<i>Siska</i>
7	17 Maret 2022	Ubah penjelasan mengenai pengujian secara simultan (uji F)	Sudah diperbaiki	<i>Siska</i>
8	17 Maret 2022	Skripsi disetujui untuk diseminarkan	Sudah diperbaiki	<i>Siska</i>

Pekanbaru, 05 APRIL 2022
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTG1MZEWMZM

Siska
 (Dr. Siska, SE., M.Si., Ak., CA)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 373 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

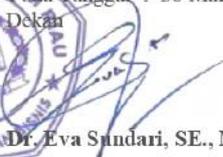
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi/oral komprehensve sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN-PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:
- N a m a : Ghazi Ferdiansyah P
N P M : 185310333
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Provinsi Riau).
2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensve mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si. Ak., CA	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., CA	Lektor, C/d	Sistematika	Sekretaris
3	Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak CA	Assisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Yolanda Pratami, SE., M.Ak	Assisten Ahli, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Maret 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

- Tembusan** : Disampaikan pada :
1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
 2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
 4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

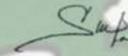
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Ghozi Ferdiansyah P
NPM : 185310333
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Provinsi Riau).
Hari/Tanggal : Rabu 30 Maret 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA		
2	Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 80)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 30 Maret 2022
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 373/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 29 Maret 2022, Maka pada Hari Rabu 30 Maret 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2021/2022

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Ghazi Ferdiansyah P |
| 2. NPM | : 185310333 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Provinsi Riau). |
| 5. Tanggal ujian | : 30 Maret 2022 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (A-) 82,5 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

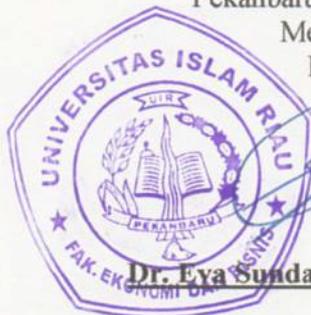
- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA | (..... ) |
| 2. Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA | (..... ) |
| 3. Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA | (..... ) |

Notulen

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Yolanda Pratami, SE., M.Ak | (..... ) |
|-------------------------------|--|

Pekanbaru, 30 Maret 2022

Mengetahui
Dekan,



Dr. Eya Sundari, SE., MM., CRBC

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh dari kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan system akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan studi empiris di SKPD Provinsi Riau. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan sebanyak 56 kuesioner yang diisi oleh staff keuangan pada 28 SKPD di Provinsi Riau. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji statistic deskriptif, uji koefisien determinasi, uji asumsi klasik dan uji t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan system akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Riau. Secara parsial, variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Riau dan variabel pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan system akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Riau.

Kata Kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Laporan Keuangan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of human resource competence, the use of information technology and the application of regional financial accounting systems on the quality of local government financial reports with empirical studies in SKPD Riau Province. The type of research conducted is quantitative. Data was collected by distributing 56 questionnaires filled out by financial staff at 28 SKPD in Riau Province. The data obtained were then analyzed using data analysis techniques consisting of multiple linear regression analysis, descriptive statistical test, coefficient of determination test, classical assumption test and t test. The results of this study indicate that simultaneously, the competence of human resources, the use of information technology and the application of regional financial accounting systems affect the quality of local government financial reports at SKPD Riau Province. Partially, the variable of human resource competence affects the quality of local government financial reports at the Riau Province SKPD and the variable of the use of information technology and the application of regional financial accounting systems has no effect on the quality of local government financial reports at the Riau Province SKPD.

Keywords: Human Resources Competence, Utilization of Information Technology, Implementation of Regional Financial Accounting Systems, Financial Reports

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, nikmat serta kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Provinsi Riau)”. Shalawat beserta salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini, yakni agama islam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya pada yaumul akhir kelak aamiin. Penyusunan Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan dukungan serta masukan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Ibu Dr.Eva Sundari, SE.,MM.,CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr.Siska, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau sekaligus sebagai Dosen

Pembimbing yang telah memberikan waktu, motivasi, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau atas semua ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi amal jariyah yang pahalanya tidak terputus.
5. Seluruh Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang membantu kelancaran mahasiswa dalam urusan administrasi akademik.
6. Orang tua tercinta atas didikan, bimbingan dan pengorbanan yang luar biasa serta do'a yang tiada henti untuk penulis.
7. Terimakasih penulis ucapkan kepada Pimpinan SKPD yang telah berkontribusi dalam kelancaran penyusunan Skripsi ini.
8. Sahabat SMKN 1 Pekanbaru, sahabat kuliah dan Melda Afri Yuliedta, SE. yang ikut serta dalam pembagian kuesioner dan dorongan motivasi yang diberikan.
9. Semua pihak yang begitu baik mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungannya. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin ya robbal'alaamiin.

Pekanbaru, Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI.....	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
PERSETUJUAN PERBAIKAN.....	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	10
2.1. Telaah Pustaka.....	10
2.1.1. Pengertian Akuntansi	10
2.1.2. Pemerintah Daerah.....	11
2.1.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	13
2.1.4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.....	14
2.1.5. Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	15
2.1.6. Pemanfaatan Teknologi Informasi	17
2.1.7. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).....	17
2.1.8. Hubungan Antar Variabel.....	19
2.2. Penelitian Terdahulu	22
2.3. Model Penelitian.....	24
2.4. Hipotesis.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Desain Penelitian	26
3.2. Lokasi/Objek Penelitian.....	26
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	27
3.4. Populasi dan Sampel	30
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	33
3.6. Teknik Pengumpulan Data	33
3.7. Uji Kualitas Data	34
3.7.1. Uji Validitas Data	34
3.7.2. Uji Reabilitas	35

3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	35
3.8 Teknik analisis Data.....	37
3.9 Koefisien Determinasi.....	37
3.10 Pengujian Hipotesis	38
3.10.1 Uji t.....	38
3.10.2 Uji F.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	41
4.1.1 Sejarah Provinsi Riau.....	41
4.1.2 Visi dan Misi Provinsi Riau.....	43
4.2 Hasil Penelitian.....	44
4.2.1 Karakteristik Profil Responden.....	45
4.2.2 Statistik Deskriptif	48
4.2.3 Hasil Uji Kualitas Data	49
4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	52
4.2.5 Teknik Analisis Data.....	56
4.2.6 Koefisien Determinasi (R^2)	58
4.2.7 Pengujian Hipotesis.....	59
4.3 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	62
4.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	62
4.3.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	62
4.3.3 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	64
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1 SIMPULAN.....	66
5.2 SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Opini LKPD Tahun 2015-2019	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Daftar Populasi SKPD Provinsi Riau	30
Tabel 3.2 Nama SKPD yang menjadi Sampel Dalam Penelitian	33
Tabel 4.1 Jumlah Responden dan Tingkat Pengembalian	44
Tabel 4.2 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 4.3 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Umur	46
Tabel 4.4 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan	47
Tabel 4.5 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	47
Tabel 4.6 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja	48
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif	49
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas	50
Tabel 4.9 Hasil Uji Realibilitas	52
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas	53
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolonieritas	55
Tabel 4.12 Analisis Regresi Linear Berganda	57
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi	59
Tabel 4.14 Hasil Uji Statistik t	60
Tabel 4.15 Hasil Uji Statistik F (ANOVA)	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	23
Gambar 3.1 Penerimaan Hipotesis Uji t	39
Gambar 3.2 Penerimaan Hipotesis Uji F	40
Gambar 4.1 Normalitas Menggunakan Grafik Histogram.....	54
Gambar 4.2 Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot	54
Gambar 4.3 Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot	56



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Kuesioner	72
Lampiran 2 Identitas Responden	79
Lampiran 3 Tabulasi Data Kuesioner	82
Lampiran 4 Output Hasil Uji Analisis	92
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian	109



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatur bahwa penyusunan dan penyajian LKP harus menyesuaikan dasar SAP yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Firdaus, Nadirsyah, & Fahlevi, 2015). Proses akuntansi atau tata keuangan telah berkembang dengan kemajuan system keuangan modern. Instansi pemerintah saat ini, harus meningkatkan kualitas kinerja keuangan agar dapat mengikuti perkembangan akuntansi karena sebagai pengguna informasi khususnya masyarakat menuntut peningkatan akuntabilitas dan transparansi dari instansi pemerintah. Pemerintah daerah wajib mempublikasikan informasi melalui laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, publikasi informasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemakai informasi. Informasi dianggap bermanfaat jika dapat dipahami, dipercaya dan digunakan oleh pengguna informasi tersebut. (Andriani, 2010) dalam (Mahaputra & Putra, 2014).

Dasar pengambilan keputusan diambil dari LK yang disajikan pemerintah daerah diperuntukkan kepada pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah harus dapat fokus pada informasi yang disediakan pada laporan keuangan dengan tujuan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. (Sukmaningrum, 2012). Selanjutnya, Pemerintah daerah wajib menghasilkan laporan keuangan

pemerintah daerah yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan adalah tolak ukur yang perlu ditempuh dalam informasi akuntansi agar dapat mencapai tujuan. (PP No.71 Tahun 2010).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 Laporan keuangan yang berkualitas ialah “laporan keuangan yang mempunyai karakteristik relevan, handal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami”. Dari hasil audit BPK maka dapat terlihat suatu laporan keuangan pemerintah daerah itu berkualitas atau tidak. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Ratifah & Ridwan,2012).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya akan memberikan penilaian berupa opini/pendapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada saat BPK mengeluarkan opini WTP kepada LKPD, ini berarti bisa dikatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar serta berkualitas. (Rahayu,2014). Menurut UU nomor 15 tahun 2004 ada empat opini yang digunakan saat pemeriksaan yaitu “Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberikan Pendapat.”

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyampaikan bahwa Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang mendapatkan hasil opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk kelima kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2015 hingga 2019 dari Badan Pengawasan

Keuangan (BPK). (www.bpk.go.id). Berikut adalah hasil opini BPK terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 2015-2019:

Tabel 1.1
Opini LKPD Tahun 2015-2019

	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Riau	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

(sumber : IHPS Semester I Tahun 2020 (www.bpk.go.id))

Berdasarkan fakta yang dapat diketahui dari Tabel 1.2 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Provinsi Riau selama lima tahun berturut-turut. Opini tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya penurunan kualitas pelaporan keuangan. Tidak adanya penurunan kualitas pelaporan dengan hasil WTP belum bisa dijadikan dasar untuk memastikan bahwa laporan keuangan di Provinsi Riau benar-benar berkualitas dikarenakan BPK mengatakan masih menemukan 4 catatan kelemahan dan 9 permasalahan terkait ketidakpatuhan pemprov Riau untuk dievaluasi.

Pertama mengenai penyertaan modal kepada 4 BUMD Provinsi Riau yang belum disajikan. Catatan selanjutnya adalah pengelolaan asset Pemerintah Provinsi Riau belum terkelola sepenuhnya seperti pengelolaan mobil-mobil dinas yang tidak membayar pajak dan banyak pejabat yang menguasai mobil dinas lebih dari satu. Ketiga, pengelolaan pendapatan retribusi daerah belum sepenuhnya optimal dan catatan yang terakhir adalah pengelolaan investasi dan budi daya ikan di Dinas Perikanan dan kelautan tak sesuai ketentuan (<https://www.halloriau.com/>)

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019, BPK menemukan beberapa permasalahan yang ada di Provinsi Riau diantaranya permasalahan pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan, permasalahan kekurangan penerimaan dimana penerimaan negara/daerah selain denda keterlambatan belum ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas Negara/daerah dan penggunaan langsung penerimaan Negara/daerah senilai Rp180,35 juta..

Pemerintah sangat memerlukan laporan keuangan yang benar-benar berkualitas supaya menghasilkan informasi yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan penunjang yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Maka, perlu melakukan suatu penelitian yang menganalisis faktor tersebut untuk menentukan seberapa besar dampaknya kepada kualitas LKPD.

Pramudiarta (2015) menyatakan bahwa untuk pengelolaan keuangan daerah yang efektif, SKPD perlu mempunyai SDM yang bertalenta, ditunjang dengan latar belakang pendidikan akuntansi, ikut serta dalam pelatihan serta pendidikan dan pengalaman dibagian keuangan. Ini dipergunakan saat mengaplikasikan sistem akuntansi. SDM yang handal merupakan asset penting untuk pemerintah daerah dalam mewujudkan kualitas dalam sebuah laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sebagai dasar pengambilan keputusan baik bagi pengguna internal maupun eksternal, dimana aspek yang mampu mempengaruhi produktivitas menurut Afandi, P. (2018) terdiri dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, maupun perilaku.

Penelitian mengenai sumber daya manusia dilakukan oleh Galuh Eka (2020) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, namun Firly (2019) menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain itu yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Tata Sutabri (2014:3) pemanfaatan informasi ialah teknologi yang dipergunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas tinggi, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang dipergunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dalam pengambilan keputusan. Teknologi saat ini berkembang pesat dan memberi segala manfaat dalam banyak aspek kegiatan, terutama dalam bisnis. Adanya teknologi informasi memberikan banyak keuntungan, akan tetapi penerapan teknologi informasi tidak mudah, apabila tidak mengetahui atau dapat menggunakan teknologi informasi maka akan merugikan sehingga akan menambah biaya. Keterbatasan penerapan teknologi informasi ini terkait dengan *hardware*, *software*, pemutakhiran data, keadaan sumber daya manusia serta biaya terbatas. Hambatan ini merupakan salah satu penyebab belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah.

Penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi pernah diteliti oleh Arisa (2019) yang mengatakan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan, namun pendapat Galuh (2020)

Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah selain membutuhkan sumber daya manusia yang handal juga perlu adanya penerapan SAKD. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), SAKD berguna sebagai pengoptimalan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan dengan mengembangkan dan memberlakukan SAP. (Nurillah,2014).

Menurut permendagri No. 59 Tahun 2007 sistem akuntansi keuangan daerah yaitu “deretan langkah yang diawali dengan mengumpulkan data, pencatatan, pengikhtisaran, berakhir dengan pelaporan keuangan dalam bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan dengan cara manual atau aplikasi komputer.”

Penelitian mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pernah dilakukan oleh Arisa (2019) yang menyebutkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan, namun penelitian yang dilakukan oleh Firly (2019) bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ketidaksesuaian dan ketidakkonsistenan serta banyak instansi pemerintah yang belum bisa menciptakan laporan keuangan berkualitas tinggi sejalan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menarik peneliti untuk menelaah mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Deni (2017) dengan mengganti sampel atau objek penelitian pada SKPD di Provinsi Riau. Sehubungan dengan uraian yang sudah dipaparkan diatas maka peneliti terdorong untuk meneliti lebih lanjut penelitian berjudul: **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Provinsi Riau).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau
3. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memberikan bukti empiris tentang Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah pada SKPD Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Riau.

b) Bagi SKPD

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan daerahnya dimasa yang akan datang.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan serta sumber informasi atau masukan pada penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi atas enam bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini berisikan teori-teori atau konsep yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

BAB III: METODE PENELITIAN

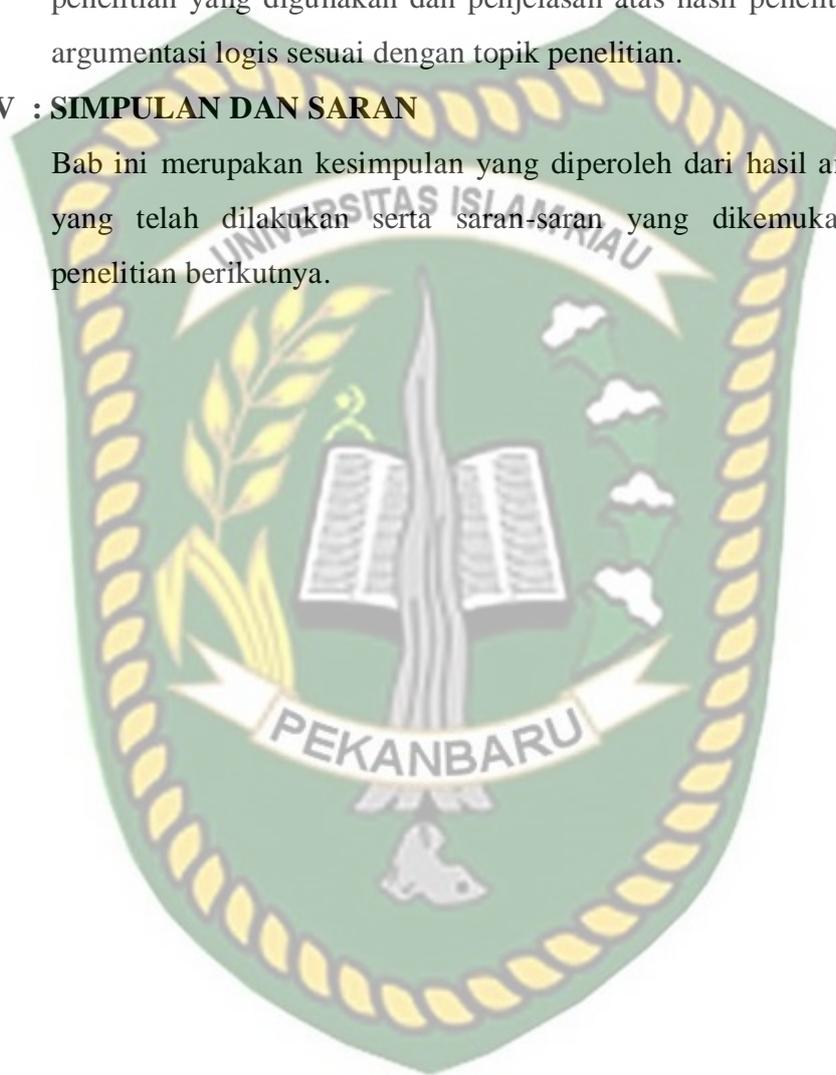
Bab ini berisikan objek penelitian, lokasi dan objek penelitian, operasional dan pengukuran variable, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, pemaparan hasil pengolahan data penelitian sesuai dengan metode penelitian yang digunakan dan penjelasan atas hasil penelitian dengan argumentasi logis sesuai dengan topik penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data yang telah dilakukan serta saran-saran yang dikemukakan untuk penelitian berikutnya.



BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklarifikasi, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan (sujarweni, 2015:1).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun (2010) pasal 1 ayat 2 akuntansi adalah:

“proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.”

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada delapan macam yaitu:

1. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*) Adalah bidang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk semua pihak terutama pihak-pihka dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan bersifat serbaguna.
2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*) Adalah akuntansi yang digunakan untuk memberikan informasi bagi manajemen agar manajemen dapat mengambil sebuah keputusan untuk dapat mencapai tujuan perusahaan.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*) Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*) Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya secara obyektif.
5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*) Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.

6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*) Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*) Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisa dan pengawasannya.
8. Akuntansi Organisasi Nir laba (*Non Profit Accounting*) Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain.

2.1.2 Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih (Setyaningrum, 2012).

Pemerintahan Daerah merupakan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Perangkat daerah yang menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan merupakan fungsi dari pemerintah daerah. Menurut

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 285 fungsi dari pemerintah daerah adalah :

1. “Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.”

Unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah. Dalam kaitan ini, peran pemerintah daerah ialah segala sesuatu yang berbentuk otonomi daerah dan merupakan hak, kekuasaan, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan menjaga kepentingan social daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan “bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan tersebut, pemerintah daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (PP Nomor 24 Tahun 2004) Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Analisis laporan keuangan

diperlukan untuk menilai pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah pada tahun anggaran. Analisis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apakah kondisi keuangan daerah telah membaik atau malah memburuk dibandingkan tahun yang terdahulu.”

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut (Suteja,2018) “Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.”

Menurut Mahmudi (2016) pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan karena beberapa alasan. Dari perspektif internal, laporan keuangan yaitu sarana pengawasan dan pemeriksaan kinerja pemerintah. Bagi pihak internal laporan keuangan yaitu sebuah bentuk pertanggungjawaban internal (*internal accountability*), yaitu bentuk pertanggungjawaban Kepala/Pimpinan daerah terhadap pemerintah daerah dan staf DPRD. Sedangkan, dari perspektif pengguna eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada public, investor, kreditur, lembaga donor, akademisi dan pengamat, pers, dan industri nasional maupun daerah serta pemangku kepentingan lainnya sebagai landasan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik (*external accountability*).

Laporan keuangan dibikin untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*), yaitu keterbukaan pemerintah untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan pengelolaan sumber

daya publik kepada pihak yang berkepentingan. Sementara itu, akuntabilitas publik pemerintah daerah, memiliki kepentingan untuk memberikan informasi dan mengungkapkan kegiatan dan kinerja keuangan pemerintah daerah kepada pihak yang berkepentingan.

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan “laporan yang tersusun mengenai posisi keuangan serta transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangannya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas laporan keuangan bisa dilihat dari karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu:

1. Relevan
Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang relevan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa peristiwa masa lalu dan masa kini. Relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi masa lalu.
 - b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
2. Andal

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan material maupun hal yang menyesatkan, informasi harus disajikan secara fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik berikut; Penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas.

3. Dapat dibandingkan
Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas lain.
4. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh para pengguna. Oleh Sebab itu, terciptalah Informasi yang dapat dipahami dan dipelajari oleh khalayak umum sehingga Informasi menjadi relevan terhadap keputusan yang akan di lakukan.”

2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Nawawi (2000) dalam Sunyoto (2012) menyatakan sumber daya manusia mencakup tiga defenisi, yaitu: (a) SDM ialah orang-orang yang bertugas dalam organisasi, yaitu tenaga kerja, pegawai atau karyawan, (b) SDM ialah kemampuan manusia untuk menjadi pendorong suatu organisasi untuk menciptakan eksistensinya, (c) SDM adalah kemampuan yang berfungsi sebagai asset dan pegangan dalam suatu organisasi yang bisa dibentuk menjadi potensi nyata secara fisik ataupun non fisik untuk menciptakan eksistensi suatu organisasi. Kualitas dan kinerja suatu organisasi sangat bergantung pada sumber daya manusia, karena dalam suatu organisasi keberadaan sumber daya manusia tidak bisa digantikan oleh factor yang lain.

Menurut Sedarmayanti (2017) karakteristik sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan (*Knowledge*)
2. Keterampilan (*skill*)

3. Sikap (*attitude*)

Aspek yang mampu mempengaruhi produktivitas menurut Afandi, P. (2018) meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, maupun perilaku. Pegawai yang memiliki wawasan serta pendidikan tinggi diharapkan bisa menciptakan pekerjaan yang unggul dan produktif. Keterampilan mengacu pada kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas yang bersifat teknis. Kemampuan terbentuk dari sekumpulan kompetensi yang dimiliki pegawai.

Pramudiarta (2015) menyatakan bahwa untuk pengelolaan keuangan daerah yang efektif, SKPD perlu mempunyai SDM yang bertalenta, ditunjang dengan latar belakang pendidikan akuntansi, ikut serta dalam pelatihan serta pendidikan dan pengalaman dibagian keuangan. Ini dipergunakan saat mengaplikasikan sistem akuntansi. SDM yang handal merupakan asset penting untuk pemerintah daerah dalam mewujudkan kualitas dalam sebuah laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sebagai dasar pengambilan keputusan baik bagi pengguna internal maupun eksternal.

Rekrutmen SDM adalah suatu proses untuk mencari calon pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia organisasi atau perusahaan. Dalam tahapan ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan/job description dan juga spesifikasi pekerjaan/job specification. Penarikan tenaga kerja merupakan proses pencarian calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan. Penarikan tenaga kerja berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan

tenaga kerja sesuai dengan jumlah dan kualitasnya, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

2.1.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam kondisi lingkungan yang penuh ketidakpastian sangat dibutuhkan informasi yang cepat, andal dan akurat. Apabila perusahaan telah melakukan inverstasi dibidang informasi maka kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Teknologi informasi terdiri dari computer, perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan, *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al*, 2000 dalam Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010).

Menurut Tata Sutabri (2014:3) pemanfaatan informasi ialah teknologi yang dipergunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas tinggi, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang dipergunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dalam pengambilan keputusan.. Menurut Wardani dan Ika (2017) indikator pemanfaatan teknologi informasi antara lain:

1. Proses kerja secara elektronik
2. Pengolahan dan penyimpanan data keuangan.
3. Pengolahan informasi dengan jaringan internet.
4. Sistem Manajemen.
5. Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat computer.

2.1.7 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Menurut Pemandagri No. 59 Tahun 2007 “Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas dan prosedur akuntansi aset.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan Sistem Akuntansi Keuangan Pusat (SAKP), diantaranya :

1. Basis Akuntansi

SAKD memiliki basis kas yang digunakan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual pada neraca.

2. Sistem Pembukuan Berpasangan

Sistem pembukuan berpasangan (*double entry system*) didasarkan pada persamaan akuntansi.

Laporan keuangan dikerjakan oleh tiap SKPD. Selanjutnya, laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh PPKD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kota/ Kabupaten. Laporan keuangan yang dibuat ialah ;

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan dua kali pada satu tahun anggaran, yaitu semester pertama dan semester kedua. Laporan semester kedua disertakan data dan informasi keuangan semester satu (I) dan semester dua (II).

2.1.8 Hubungan Antar Variabel

a. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kemampuan SDM meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dapat memungkinkan laporan keuangan memenuhi karakteristiknya, sehingga memungkinkan untuk menerapkan pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi untuk memperoleh laporan keuangan berkualitas tinggi. di sisi lain, jika sumber daya manusia tidak sepenuhnya kompeten, maka tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas tidak dapat ditetapkan.

Dengan adanya sumber daya manusia berkompeten dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan akan menyajikan informasi laporan keuangan yang berkualitas, dimana kompetensi SDM ialah kemampuan yang harus dipunyai pegawai seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Suparno, 2005:24). Penelitian mengenai sumber daya manusia dilakukan oleh Galuh Eka (2020) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, namun Firly (2019) menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Teknologi saat ini berkembang sangat pesat dan memberikan banyak kemudahan dalam segala aspek kegiatan, terutama dalam bisnis. Adanya teknologi informasi memberikan banyak keuntungan, akan tetapi penerapan teknologi informasi tidak gampang, apabila tidak mengetahui atau dapat menggunakan teknologi informasi maka akan merugikan sehingga akan menambah biaya. Keterbatasan penerapan teknologi informasi ini terkait dengan hardware, software, pemutakhiran data, keadaan sumber daya manusia serta biaya terbatas. Hambatan ini merupakan salah satu penyebab belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah.

Penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi pernah diteliti oleh Arisa (2019) yang mengatakan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan, namun pendapat Galuh (2020) Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari penjelasan yang ada, maka penelitian ini bertujuan menguji kembali hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c. **Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan keuangan Daerah**

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah selain membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten juga perlu adanya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) bertujuan dalam pengoptimalan akuntabilitas serta keandalan pengelola keuangan dengan mengembangkan serta memberlakukan standar akuntansi pemerintahan. (Nurillah,2014).

Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 sistem akuntansi keuangan daerah adalah “deretan langkah yang diawali dengan mengumpulkan data, pencatatan, pengikhtisaran, berakhir dengan pelaporan keuangan dalam bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan dengan cara manual maupun aplikasi komputer.” Penelitian mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pernah dilakukan oleh Arisa (2019) yang menyebutkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan, namun penelitian yang dilakukan oleh Firly (2019) bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari penjelasan yang ada, maka penelitian ini bertujuan menguji kembali hubungan antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Galuh Eka Agustin (2020)	Pengaruh Penerapan Sitem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya)	Variable independen - Penerapan system akuntansi keuangan daerah - Pemanfaatan teknologi informasi - Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel dependen - Kualitas Laporan Keuangan	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan system akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
2	Firly Nahdya Badrun (2019)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sitem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Variable independen - kompetensi Sumber daya manusia - System akuntansi keuangan daerah - Pemanfaatan teknologi informasi Variabel dependen - Kualitas Laporan Keuangan	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan system akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
3	Arisa Ariani	Pengaruh kompetensi	Variabel Independen	Hasil Penelitian

	(2019)	sumber daya manusia, penerapan system akuntansi keuangan daerah (SAKD), Pemanfaatan teknologi informasi dan system pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada SKPD Kota Pekanbaru)	- kompetensi Sumber daya manusia - System akuntansi keuangan daerah - Pemanfaatan teknologi informasi - Sistem Pengendalian Intern Variabel dependen - Kualitas Laporan Keuangan	ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan system akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi, system pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
4	Deni Yuwilia Wardani (2017)	Pengaruh Sdm, Penerapan Aplikasi Keuangan Dan Penerapan Sap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Variable independen - Kompetensi sumber daya manusia - Penerapan aplikasi keuangan - Standar akuntansi pemerintahan Variable dependen : - Kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan tetapi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
5	Andini Yusrawati (2015)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan	Variable independen - Sumber Daya Manusia	Bahwa Kompetensi SDM dan penerapan

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

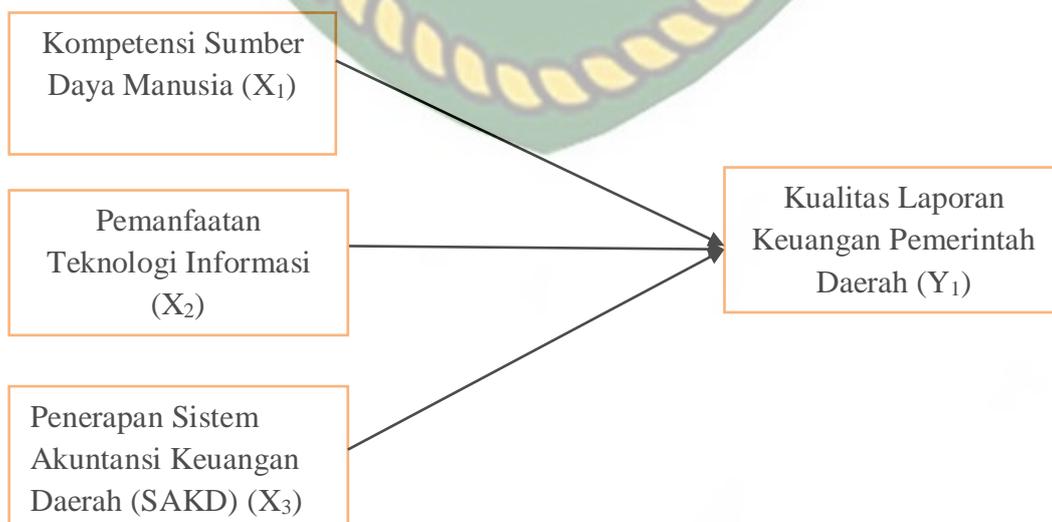
Perpustakaan Universitas Islam Riau

		Sistem Akuntansi Keuangan daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang	- Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Variable dependen - Kualitas laporan keuangan	sesistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang
--	--	---	--	---

2.3 Model Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variable terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variable bebas yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada model berikut ini:

Gambar 2.1
Model Penelitian



2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah digambarkan diatas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H1** : Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Provinsi Riau
- H2** : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Provinsi Riau
- H3** : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Provinsi Riau
- H4** : Kompetensi Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Provinsi Riau

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi/sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono, 2016)

Jenis dari penelitian ini ialah hubungan sebab akibat (asosiatif kausal). Menurut Sugiono (2016:55) penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bermaksud untuk mencari tahu kaitan antar dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Hubungan kausal merupakan hubungan sebab-akibat, salah satu variable (*independen*) mempengaruhi variable yang lain (*dependen*).

3.2 Lokasi/Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah SKPD Provinsi Riau. Masalah yang diteliti adalah “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Untuk menguji hipotesis yang diajukan variable yang diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi variable dependen dan variable independen.

3.3.1 Variabel Dependen

Menurut Sugiono (2016:39), variable dependen adalah variable yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variable independen. Variable dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Indikator yang digunakan menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 adalah “laporan keuangan yang mempunyai karakteristik relevan, handal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami.”

Pertanyaan di kuesioner penelitian mengenai variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah didasarkan pada skripsi Deni (2017). Setiap item dari tiap variabel digunakan sebagai acuan dalam membuat kuesioner yang jawabannya akan diberi nilai:

1. Sangat Setuju (SS) skor 5
2. Setuju (S) skor 4
3. Kurang Setuju (KS) skor 3
4. Tidak Setuju (TS) skor 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1

3.3.2 Variabel Independen

Menurut Sugiono (2016:39), Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable terikat (*dependen*). Dalam penelitian ini variabel independennya adalah :

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah keahlian dan karakter yang dikuasai oleh seorang pegawai berbentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam melaksanakan kewajiban jabatannya, sehingga pegawai tersebut mampu menjalankan kewajibannya secara profesional, efektif dan efisien (Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2007). Indikator yang digunakan dari variabel ini ialah Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan.

Pertanyaan di kuesioner penelitian mengenai mengenai variabel independen kompetensi sumber daya manusia didasarkan pada Deni (2017). Setiap item dari tiap variabel digunakan sebagai acuan dalam membuat kuesioner yang jawabannya akan diberi nilai:

1. Sangat Setuju (SS) skor 5
2. Setuju (S) skor 4
3. Kurang Setuju (KS) skor 3
4. Tidak Setuju (TS) skor 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1

b. Pemanfaatan teknologi informasi

Dalam kondisi lingkungan yang penuh ketidakpastian sangat dibutuhkan informasi yang cepat, andal dan akurat. Apabila perusahaan telah melakukan inverstasi dibidang informasi maka kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Teknologi informasi terdiri dari computer, perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan, *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al*, 2000 dalam Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010). Indikator pengukuran dari variabel ini adalah Pemanfaatan Komputer dan Pemanfaatan Jaringan Internet.

Pertanyaan di kuesioner penelitian mengenai mengenai variabel independen pemanfaatan teknologi informasi didasarkan pada Deni (2017). Setiap item dari tiap variabel digunakan sebagai acuan dalam membuat kuesioner yang jawabannya akan diberi nilai:

1. Sangat Setuju (SS) skor 5
2. Setuju (S) skor 4
3. Kurang Setuju (KS) skor 3
4. Tidak Setuju (TS) skor 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1

c. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Menurut Pemendagri No. 59 Tahun 2007 “Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara

manual atau menggunakan aplikasi komputer.” Indikator pengukuran dari variabel ini adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah dan prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan yang berlaku umum.

Pertanyaan di kuesioner penelitian mengenai mengenai variabel independen penerapan system akuntansi keuangan daerah (SAKD) didasarkan pada Deni (2017). Setiap item dari tiap variabel digunakan sebagai acuan dalam membuat kuesioner yang jawabannya akan diberi nilai:

1. Sangat Setuju (SS) skor 5
2. Setuju (S) skor 4
3. Kurang Setuju (KS) skor 3
4. Tidak Setuju (TS) skor 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah Seluruh objek yang menjadi sumber dalam pengambilan sampel (Sugiono,2012). Populasi di penelitian ini ialah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Riau sebanyak 48 SKPD sedangkan yang digunakan untuk sampel berjumlah 28 SKPD.

Tabel 3.1
Daftar Populasi SKPD Provinsi Riau

NO	NAMA SKPD PROVINSI RIAU
1	Sekretariat Daerah Provinsi Riau
2	Inspektorat Provinsi Riau
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau
5	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau
6	Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau
7	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau

8	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau
9	Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau
10	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau
11	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
12	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
13	Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau
14	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau
15	Badan Penghubung Provinsi Riau
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau
18	RSJ Tampan Provinsi Riau
19	Dinas Pendidikan Provinsi Riau
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau
21	Dinas Kesehatan Provinsi Riau
22	Dinas Sosial Provinsi Riau
23	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau
24	Dinas Perhubungan Provinsi Riau
25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau
26	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau
27	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau
29	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau
30	Dinas Peternakan Provinsi Riau
31	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau
32	Dinas Perkebunan Provinsi Riau
33	Dinas Kehutanan Provinsi Riau
34	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau
35	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau
36	Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau
37	Sekretaris DPRD Provinsi Riau
38	Satuan Polisi Pamong Praja
39	Sekretaris Korpri Provinsi Riau
40	Biro Tata Pemerintahan
41	Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
42	Biro Hubungan Masyarakat
43	Biro Administrasi Pembangunan
44	Biro Administrasi Perekonomian

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

45	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
46	Biro Umum
47	Biro Keuangan
48	Biro Perlengkapan

Sumber : <https://www.riau.go.id/home/en/content/8/organisasi-pemprov>

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *Purposive Sampling*, yaitu suatu mode pemilihan sampel dengan memberikan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk dijadikan sampel penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini disebabkan keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Pemilihan badan, dinas dan inspektorat dilakukan dengan alasan yaitu instansi tersebut merupakan satuan kerja pemerintah yang berarti menyusun, menggunakan dan melaporkan realisasi anggaran dari pemerintah daerah. Bendahara dan Staff Keuangan merupakan responden dalam 28 SKPD. Akan ada 2 pegawai menjadi responden di tiap SKPD.

Tabel 3.2
Nama SKPD yang menjadi Sampel dalam Penelitian

No	Nama	Responden
1	Inspektorat Provinsi Riau	2
2	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	2
3	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	2
4	Dnas Komunikasi, Informatika Dan Statistic	2
5	Dinas Pariwisata Provinsi Riau	2
6	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	2
7	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Riau	2
8	Dinas Sosial Provinsi Riau	2
9	Dinas Perindustrian Provinsi Riau	2
10	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Riau	2
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutan Perovinsi Riau	2
12	Dinas Kelautan Dan Perikanan	2
13	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Riau	2
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan	2

	Anak Provinsi Riau	
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2
18	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan	2
19	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	2
20	Dinas Kebudayaan	2
21	Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Dan Perkebunan	2
22	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	2
23	Badan Kepegawaian Daerah	2
24	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau	2
25	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau	2
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau	2
28	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau	2
JUMLAH		56

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer. Data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan langsung dari sumbernya (Pramudiarta,2015). Data primer didapat berdasarkan jawaban kuesioner dari responden. Kuesioner dibuat dengan baik serta jelas supaya responden dapat mengerti isi kuesioner dan mencapai *respon rate* yang tinggi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono (2016:224), teknik pengumpulan data merupakan data yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mengumpulkan data. Wawancara dan kuesioner digunakan sebagai teknik pengumpulan data pada riset ini.

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2017:194) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah dari responden tersebut sedikit. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada salah satu pegawai pada masing-masing SKPD di Provinsi Riau

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono,2016:142). Kuesioner penelitian ini langsung diserahkan kepada responden atau meminta bantuan salah satu pegawai pada masing-masing SKPD untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan kuesioner pada SKPD tersebut.

3.7 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dimaksudkan untuk mengetahui besar tingkat konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen penelitian. Pengujian terhadap kualitas data penelitian ini dapat dilakukan dengan uji validitas dan uji reabilitas.

3.7.1 Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Validitas item-item pertanyaan kuesioner dapat diukur dengan melakukan korelasi antara skor item pertanyaan dengan total skor variabel atau konstruk. Apabila korelasi antara masing-masing item atau indikator terhadap total skor variabel menunjukkan hasil probabilitas $<0,01$ atau $<0,05$ berarti angka probabilitas tersebut signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pertanyaan adalah valid (Sugiyono,2016).

3.7.2 Uji Reabilitas

Uji Reliabilitas adalah data untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji ini dilakukan dengan menghitung nilai cronbach alpa untung masing-masing variabel. Suatu alat dikatakan reliable jika nilai cronbach alpha $>0,60$.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah jika distribusi datanya normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat grafik normal P-P Plot dan uji Kolmogorov Smirnov. Grafik histogram

membandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal maka garis yang digambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi salah satunya adalah dengan melihat nilai tolerance dan lawannya, dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai tolerance $>0,1$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$ berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan grafik scatterplot. Pendeteksian mengenai ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu

pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah di studentized.

3.8 Teknik analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif yang membandingkan data yang ada dengan berbagai teori yang mendukung dan bersifat menjelaskan atau menguraikan dan memakai bantuan SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 26.00. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, analisis yang digunakan adalah model regresi berganda. Bentuk persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a: Konstanta

X1: Kompetensi Sumber Daya Manusia

X2: Pemanfaatan Teknologi Informasi

X3: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

b1: Koefisien Regresi X1

b2: Koefisien Regresi X2

b3: Koefisien Regresi X3

e: Tingkat kesalahan pengganggu (error)

3.9 Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2016) koefisien determinasi R^2 untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah antara nol sampai 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.10 Pengujian Hipotesis

Untuk menentukan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka dalam penelitian ini akan menggunakan uji t dan uji f untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan.

3.10.1 Uji t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel penjelas atau independen dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:98). Level of significant pada taraf $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan dinyatakan dalam $df-n-1$ yang merupakan uji satu sisi (one tailed test). Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan dengan kriteria:

- 1) Jika $t_{Hitung} > t_{Tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,00$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen

- 2) Jika $t_{Hitung} < t_{Tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,00$, maka H_0 diterima atau H_a ditolak, artinya variable independen tidak berpengaruh terhadap variable dependen



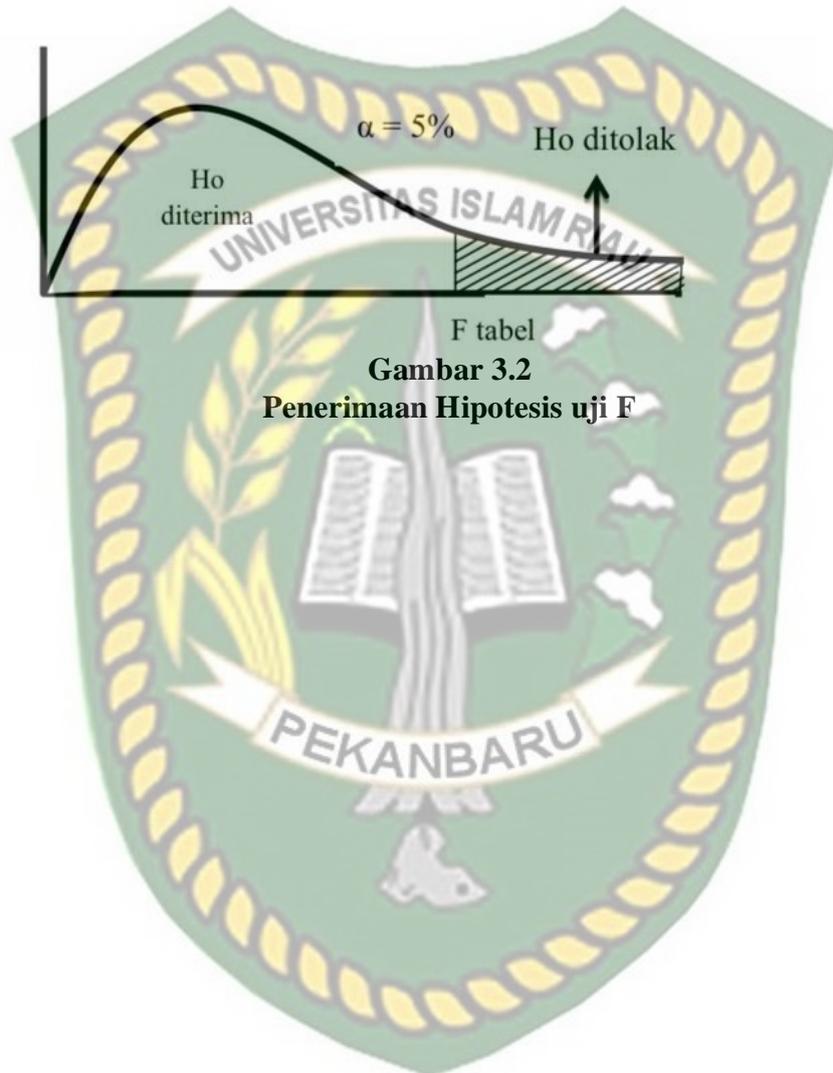
Gambar 3.1
Penerimaan Hipotesis Uji t

3.10.2 Uji F

Menurut Ghozali (2016) uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (Goodness of fit). Uji F menguji apakah variabel independen yang mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak (Ghozali, 2016:98). Menentukan F tabel dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% dengan derajat kebebasan pembilang (di)-k dan derajat kebebasan penyebut (df)-n-k-1 dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan dengan kriteria:

- 1) Jika $F_{Hitung} > F_{Tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,00$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya model yang digunakan bagus (*fit*).

- 2) Jika $F_{\text{Hitung}} < F_{\text{Tabel}}$ atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima atau H_a tidak diterima, artinya model yang digunakan tidak bagus (tidak *fit*)



Gambar 3.2
Penerimaan Hipotesis uji F

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Provinsi Riau

Sejarah Provinsi Riau dalam Riau.go.id menyebutkan Secara etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, “Rio”, yang artinya sungai. Riau dirujuk hanya ke wilayah yang dipertuan muda (Raja Bawah Johor) di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang dan Riouw oleh masyarakat lokal dieja menjadi Riau.

Riau merupakan penggabungan dari kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis.

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No.61 tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha yang keras dalam kurun waktu 6 tahun 17 November 1952 s / d 5 Maret 1958).

Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 No.258 / M / 1958, Mr.SM Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau pertama kali pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu / pada Keputusan Menteri Dalam

Negeri No. Desember / I / 44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru menjadi ibukota Provinsi Riau menggantikan Tanjung Pinang.

Berikut nama-nama Gubernur Riau dan periode jabatannya:

1. Tn. SM Amin Periode 1958 – 1960
2. H. Kaharuddin Nasution Periode 1960 – 1966
3. H. Arifin Ahmad Periode 1966 – 1978
4. Jam Subrantas.S Periode 1978 – 1980
5. H. Prpto Prayitno (Plt) 1980
6. H. Imam Munandar Periode 1980 – 1988
7. H. Baharuddin Yusuf (Plh) 1988
8. Atar Sibero (Plt) 1988
9. H. Soeripto Periode 1988 – 1998
10. H. Saleh Djasit Periode 1998 – 2003
11. HM Rusli Zainal Periode 2003 - September 2008 dan periode November 2008 -2013
12. H. Wan Abubakar MSi Periode September 2008 - Nopember 2008 (Plt. Gubernur, karena Gubernur incumbent mengundurkan diri mengikuti Pilkada Gubernur Riau periode 2008 – 2013)
13. M Rusli Zainal Periode 2008 – 2013
14. Prof.Dr.Djohermansyah Djohan, MA (Plt) Periode 2013 – 2014
15. Drs. H. Annas Maamun Periode Februari 2014 - September 2014
16. Ir. Arsyadjuliandi Rachman. MBA Periode 2014 – 2018
17. H.Wan Thamrin Hasyim Periode 2018 – Februari 2019

18. Drs. H. Syamsuar, M.Si Periode 2019 – Sekarang

4.1.2 Visi dan Misi Provinsi Riau

a. Visi Pembangunan Provinsi Riau

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2024 , yaitu:

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul Di Indonesia”

1. **Berdaya Saing** : Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan hidup yang lestari
2. **Sejahtera** : kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran
3. **Bermartabat** : mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama serta penerapan falsafah melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat
4. **Unggul** : menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan

b. Misi Pembangunan Provinsi Riau

Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan
3. Mewujudkan Pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing
4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis Teknologi Informasi

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian kuesioner dilakukan dengan cara mengantarkan langsung ke lokasi penelitian yaitu 28 SKPD di Provinsi Riau. Responden berdasarkan penelitian ini merupakan staff keuangan yang terdapat pada 28 SKPD di Provinsi Riau. Pembagian kuesioner dilakukan dari tanggal 24 Januari 2022 hingga selesai. Jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 56 (rangkap) dan jumlah kuesioner yang dikembalikan sebanyak 56 (rangkap). Berikut penjelasan yang dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Jumlah Responden dan Tingkat Pengembalian

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total kuesioner yang dikirim	56	100%
Total kuesioner yang kembali	56	100%
Total kuesioner yang tidak kembali	-	-
Total kuesioner yang tidak dapat dianalisis	-	-
Total kuesioner yang dapat dianalisis	56	100%

Sumber : Data Olahan, 2022

4.2.1 Karakteristik Profil Responden

Karakteristik responden terdiri dari jenis kelamin, pendidikan terakhir dan lama bekerja. Adapun karakteristik responden pada SKPD di Provinsi Riau antara lain:

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 dibawah menunjukkan hasil uji deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.2
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	17	30,4	30,4	30,4
	Perempuan	39	69,6	69,6	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

Sumber : Data Output SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 mengungkapkan sekitar 39 pegawai (69,6%) adalah perempuan, dan sisanya 17 pegawai atau 30,4% adalah berjenis kelamin laki-laki.

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.3 dibawah menunjukkan hasil uji deskripsi responden berdasarkan umur.

Tabel 4.3
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	25 - 35	8	14,3	14,3	14,3
	36 - 45	41	73,2	73,2	87,5
	46 - 57	7	12,5	12,5	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

Sumber : Data Output SPSS, 2022

Dilihat di tabel 4.3 sebagian besar pegawai berusia 36-45 Tahun sejumlah 41 pegawai (73,2%,) berusia 25-35 Tahun sejumlah 8 pegawai (14,3%), berusia 46-57 Tahun sejumlah 7 pegawai atau (12,5%). Kesimpulan dari data diatas adalah sebagian besar umur yang berprofesi menjadi staf keuangan pada SKPD Provinsi Riau ialah 36-45 Tahun, dan ke-2 ialah 26-35 Tahun.

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.4 dibawah menunjukkan hasil uji deskripsi responden berdasarkan pendidikan.

Tabel 4.4
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	5	8,9	8,9	8,9
	S1	40	71,4	71,4	80,4
	S2	11	19,6	19,6	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

Sumber : Data Output SPSS, 2022

Berdasarkan Tabel 4.4 mengungkapkan bahwa pegawai yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 5 pegawai atau 8,9%, pendidikan Strata Satu (S1) sebanyak 40 pegawai atau 71,4%, pendidikan Strara Dua (S2) berjumlah 11 pegawai atau 19,6%..

Dari data diatas, pendidikan yang terbanyak adalah S1 sebanyak 40 orang dan S2 sebanyak 11 orang. Maka dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, manusia memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih banyak. Sehingga

seseorang yang bekerja dibagian keuangan dengan latar belakang yang memenuhi akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

d. Deskripsi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tabel 4.5 dibawah menunjukkan hasil uji deskripsi responden berdasarkan latar belakang pendidikan,

Tabel 4.5
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Akuntansi	38	67,9	67,9	67,9
	Manajemen	9	16,1	16,1	83,9
	lain-lain	9	16,1	16,1	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

Sumber : Data Output SPSS, 2022

Tabel 4.5 menyatakan mayoritas pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan Akuntansi sebanyak 38 pegawai (67,9%), sementara itu Manajemen sebanyak 9 pegawai (16,1%) dan pendidikan lainnya sebesar 9 pegawai atau 16,1%.

Dari data diatas, Latar belakang pendidikan yang terbanyak adalah pendidikan akuntansi sebanyak 38 orang. Sehingga jika bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan dapat memaksimalkan kinerjanya dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

e. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Tabel 4.6 dibawah menunjukkan hasil uji deskripsi responden berdasarkan lama bekerja

Tabel 4.6
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 – 5	6	10,7	10,7	10,7
5 – 10	6	10,7	10,7	21,4
> 10	44	78,6	78,6	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Sumber : Data Output SPSS, 2022

Tabel 4.6 menyatakan deskripsi pegawai berdasarkan lama bekerja adalah 6 pegawai atau 10,7% yang bekerja 1 - 5 tahun, 6 pegawai atau 10,7% yang bekerja selama 5 - 10 tahun, dan 44 pegawai atau 78,6% yang bekerja selama > 10 tahun.

Dari data diatas, terdapat 44 orang yang bekerja selama >10 tahun, dengan lamanya bekerja > 10 tahun membuat banyaknya pengalaman yang sudah dimiliki sehingga dapat memaksimalkan kinerjanya dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

4.2.2 Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan yang diuji secara statistik deskriptif.

Tabel 4.7
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	56	34	45	38,75	3,359
X2	56	26	35	30,79	2,470
X3	56	20	25	22,16	2,104
Y	56	34	45	39,38	3,278
Valid N (listwise)	56				

Sumber : Data Output SPSS, 2022

Tabel 4.7 menjelaskan bahwa pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia jawaban terkecil sebesar 34 dan jawaban terbesar 45 dengan rata-rata total jawaban 38,75 dan 3,359, variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi jawaban terkecil responden sebesar 26 dan jawaban terbesar responden sebesar 35 dengan rata-rata total jawaban 30,79 dan standar deviasi sebesar 2,470. Variabel Penerapan Sistem Akuntansi memiliki jawaban minimum sebesar 20 dan maksimum 25 dengan rata-rata total jawaban 22,16 dan standar deviasi sebesar 2,104. Pada variabel Kualitas Laporan Keuangan jawaban minimum sebesar 34 dan maksimum sebesar 45 dengan nilai rata-rata total sebesar 39,38 dan jawaban standar deviasi sebesar 3,278. Jumlah responden (N) yang valid dan dapat diproses lebih lanjut sebanyak 56 responden.

4.2.3 Hasil Uji Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas

Uji Validitas dipakai agar menilai suatu kuesioner sah atau tidak (Ghazali, 2018). Pengujian dikerjakan menggunakan *Pearson Corelation*, apabila taraf signifikansinya $< 0,05$ maka model tersebut dianggap valid. Untuk responden berjumlah 56 orang di SKPD Provinsi Riau, dapat diperoleh derajat bebas df sebesar $56-2 = 54$ dengan $\alpha = 0,05$ (5%) diperoleh dari r table sebesar 0,263. Jika r hitung bernilai positif dan lebih besar dari r tabel, maka pernyataan tersebut dikatakan valid.

Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas, yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan dengan sampel sebanyak 56 responden..

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas

Variabel	No Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	Item 1	0,787	0,263	Valid
	Item 2	0,837	0,263	Valid
	Item 3	0,784	0,263	Valid
	Item 4	0,668	0,263	Valid
	Item 5	0,724	0,263	Valid
	Item 6	0,817	0,263	Valid
	Item 7	0,777	0,263	Valid
	Item 8	0,767	0,263	Valid
	Item 9	0,529	0,263	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Item 1	0,787	0,263	Valid
	Item 2	0,696	0,263	Valid
	Item 3	0,800	0,263	Valid
	Item 4	0,821	0,263	Valid
	Item 5	0,484	0,263	Valid
	Item 6	0,520	0,263	Valid
	Item 7	0,787	0,263	Valid
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Item 1	0,896	0,263	Valid
	Item 2	0,851	0,263	Valid
	Item 3	0,806	0,263	Valid
	Item 4	0,858	0,263	Valid
	Item 5	0,858	0,263	Valid
Kualitas Laporan Keuangan	Item 1	0,641	0,263	Valid
	Item 2	0,719	0,263	Valid
	Item 3	0,705	0,263	Valid
	Item 4	0,603	0,263	Valid
	Item 5	0,720	0,263	Valid
	Item 6	0,767	0,263	Valid
	Item 7	0,748	0,263	Valid
	Item 8	0,628	0,263	Valid
	Item 9	0,579	0,263	Valid

Sumber : Data Output SPSS,2022

Berdasarkan perhitungan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa r hitung 30 item pernyataan melebihi r tabel (0,263). Dapat disimpulkan bahwa pada instrument tersebut adalah valid.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen-instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* berada diatas 0,70 (Nunnally, 1994) dalam (Ghozali, 2016). Tabel 4.9 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk 4 variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan.

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,899	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,823	Reliabel
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,907	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,851	Reliabel

Sumber : Data Output SPSS,2022

Tabel 4.9 menunjukkan hasil uji reliabilitas dilihat dari nilai *Cronbach's alfa* atas variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,899, variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 0,823, variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 0,907, dan variabel kualitas laporan keuangan sebesar 0,851. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai *Cronbach's alfa*

lebih besar dari 0,70. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa item pernyataan dalam kuesioner mampu memperoleh data yang konsisten.

4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dan uji analisis grafik. Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika memiliki tingkat signifikansi $> 0,05$. Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S), dapat dilihat dalam tabel 4.10

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,12757849
Most Extreme Differences	Absolute	,110
	Positive	,094
	Negative	-,110
Test Statistic		,110
Asymp. Sig. (2-tailed)		,087 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

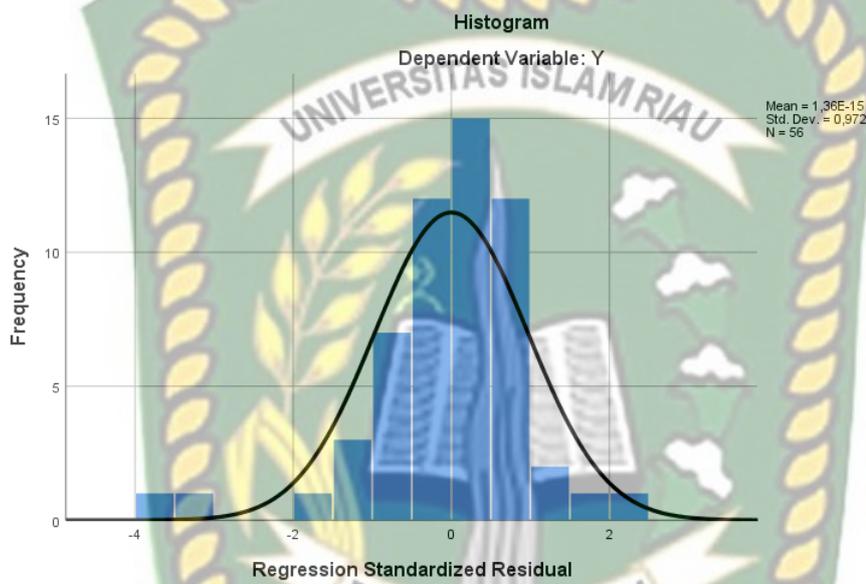
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Output SPSS,2022

Berdasarkan tabel 4.10 Hasil menunjukkan nilai signifikansi data sebesar 0,087 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa data tersebut terdistribusi secara normal sehingga model penelitian ini memenuhi uji asumsi klasik normalitas.

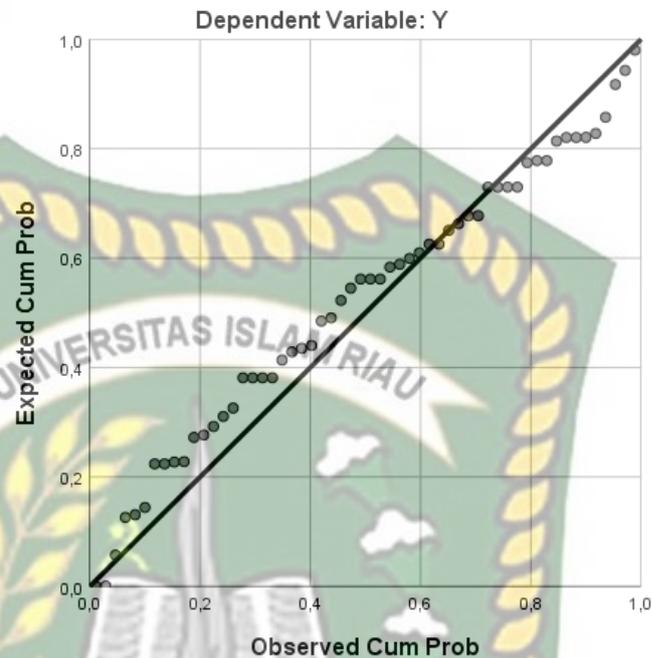
Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram



Sumber : Data Output SPSS,2022

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data Output SPSS, 2022

Gambar 4.1 menunjukkan pola penyebaran data yang berdistribusi normal. Begitu pula pada gambar 4.2 hasil uji normalitas dengan grafik P-Plot menunjukkan titik-titik yang menyebar membentuk satu garis lurus diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan grafik P-P Plot berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji analisis grafik bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Hasil Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat *Variance Inflation Factor* (VIF) dan tolerance serta

besaran korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016). Tabel 4.11 menunjukkan hasil pengujian multikolonieritas.

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolonieritas

Model		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,984	3,902		1,790	,079		
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	,362	,129	,371	2,811	,007	,465	2,152
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,334	,183	,251	1,825	,074	,427	2,344
	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,365	,206	,234	1,771	,082	,464	2,156

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

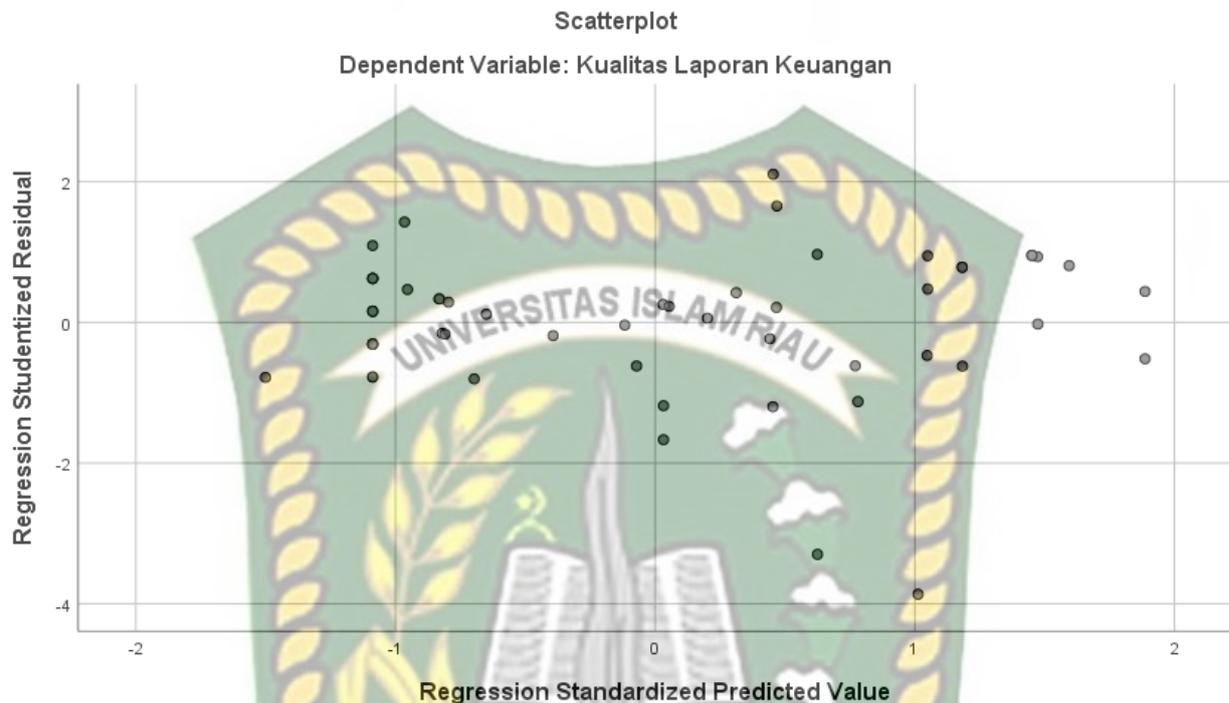
Sumber : Data Output SPSS,2022

Tabel 4.11 menunjukkan nilai tolerance masing-masing variabel bebas yang lebih besar dari 0,1 dan hasil perhitungan VIF juga menunjukkan bahwa nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi terbebas dari masalah multikolonieritas antar variabel independen dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

c. Hasil Uji Heterokedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplots. Jika grafik tidak mempunyai pola tertentu atau acak maka diduga tidak ada gejala heterokedastisitas

Gambar 4.3
Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot



Sumber : Data Output SPSS,2022

Garfik Scatterplot diatas menunjukkan bahwa data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja dan tidak membentuk suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi.

4.2.5 Teknik Analisis Data

Analisisregresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan system akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Riau. Hasil analisis regresi berganda menggunakan SPSS versi 26.0 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12
Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	6,984	3,902		1,790	,079
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	,362	,129	,371	2,811	,007
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,334	,183	,251	1,825	,074
	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,365	,206	,234	1,771	,082

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data Output SPSS, 2022

Berdasarkan Tabel di atas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$Y = 6,984 + 0,362 X_1 + 0,334 X_2 + 0,365 X_3 + e$$

Hasil dan pembahasan regresi di atas adalah :

- a. Nilai Konstanta sebesar 6,984 artinya jika variable X_1 , X_2 dan X_3 sama dengan 0 (nol) yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan system akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Riau bernilai 6,984
- b. Koefisien X_1 sebesar 0,362 setiap terjadi peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) sebesar 1% maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi riau meningkat sebesar 0,362 atau sebaliknya jika terjadi penurunan X_1 sebesar 1 % maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Riau akan menurun sebesar 0,362

- c. Koefisien X2 sebesar 0,334 setiap terjadi peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) sebesar 1% maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi riau meningkat sebesar 0,334 atau sebaliknya jika terjadi penurunan X2 sebesar 1 % maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Riau akan menurun sebesar 0,334
- d. Koefisien X3 sebesar 0,365 setiap terjadi peningkatan penerapan system akuntansi keuangan daerah (X3) sebesar 1% maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi riau meningkat sebesar 0,365 atau sebaliknya jika terjadi penurunan X3 sebesar 1 % maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Riau akan menurun sebesar 0,365.

4.2.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Berikut ini tabel hasil uji Koefisien Diterminasi (R^2) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,761 ^a	,579	,555	2,188

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Data Output SPSS, 2022

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,579 yang artinya bahwa 57,9% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Riau dijelaskan oleh variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan system akuntansi keuangan daerah sedangkan sisanya sebesar 42,1% dapat dijelaskan oleh variabel lain atau factor lain yang tidak termasuk dalam model atau persamaan regresi ini. Jadi, secara simultan variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan system akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Riau.

4.2.7 Pengujian Hipotesis

a. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu independen secara individual dalam menerangkan rdependen (Ghozali, 2016). Hasil dari uji Statistik t dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.14
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,984	3,902		1,790	,079
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	,362	,129	,371	2,811	,007
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,334	,183	,251	1,825	,074

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,365	,206	,234	1,771	,082
--	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Data Output SPSS, 2022

Pada tabel 4.14 hasil uji hipotesis ialah :

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Provinsi Riau

Dalam tabel 4.14 dikatakan bahwa Nilai signifikan t Kompetensi Sumber Daya Manusia $0,007 < \alpha (0,05)$, disimpulkan bahwa H_0 ditolak serta H_1 diterima sehingga Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Provinsi Riau.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Provinsi Riau

Dalam tabel 4.14 diketahui bahwa nilai signifikan t Pemanfaatan Teknologi Informasi $0,074 > \alpha (0,05)$, maka kesimpulannya adalah H_0 diterima dan H_2 ditolak sehingga Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Provinsi Riau.

3. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Provinsi Riau

Dalam tabel 4.14 diketahui bahwa nilai signifikan t Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan $0,082 > \alpha (0,05)$, maka kesimpulannya adalah H_0 diterima dan H_3 ditolak sehingga Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Provinsi Riau

b. Uji F

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$), maka H_0 ditolak
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$), maka H_0 diterima

Hasil dari uji Statistik F dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.15
Hasil Uji Statistik F (ANOVA)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	342,163	3	114,054	23,822	,000 ^b
	Residual	248,962	52	4,788		
	Total	591,125	55			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sumber : Data Output SPSS,2022

Dari tabel 4.15 uji ANOVA atau F_{test} diperoleh F_{hitung} sebesar 23,822 dengan tingkat signifikan 0,000 sedangkan F_{tabel} dengan $df_1 = 3$ dan $df_2 = 53$ sebesar 2.78 dengan signifikan 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model pada penelitian ini adalah layak karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($23,822 > 2.78$) dan signifikan penelitian lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga hipotesis diterima, dapat diartikan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara

simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Provinsi Riau.

4.3 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada SKPD Provinsi Riau

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwasanya Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Oleh sebab itu, apabila kompetensi sumber daya manusia bagian keuangan/akuntansi pada SKPD Provinsi Riau efektif, maka laporan keuangan daerah berkualitas yang dihasilkan lebih baik. Ini disertai dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki oleh responden dalam membuat laporan keuangan. Selain itu, juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan serta lama bekerja yang dimiliki oleh responden pada SKPD Provinsi Riau dalam menghasilkan kualitas dalam sebuah laporan keuangan.

Penelitian mengenai sumber daya manusia dilakukan oleh Galuh Eka (2020) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, namun Firly (2019) menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

4.3.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada SKPD Provinsi Riau

Dari hasil penelitian bisa diketahui Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Tidak berpengaruhnya hal tersebut disebabkan SKPD Provinsi Riau belum dapat memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal, hal ini disebabkan masih adanya hambatan dalam peralatan dan *software* pendukung yang masih sering mengalami kendala sehingga membutuhkan waktu perbaikan yang cukup lama dan berdampak pada jadwal waktu pelaporan yang mengalami penyesuaian atau mengalami kemunduran dan ini berimplikasi pada ketidaktepatan pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai karakteristik kualitatif laporan keuangan itu sendiri.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib untuk mengoptimalkan serta mengolah kemajuan teknologi informasi untuk memaksimalkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta mendistribusikan informasi keuangan daerah ke dalam system pelayanan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengolahan data akan memberikan banyak keuntungan dalam hal ketelitian hasil operasi dan predikat *multiprocessing* sebagai mesin serbaguna (Fernanda, 2014). Kemajuan teknologi informasi tidak cuma digunakan dalam organisasi bisnis, akan tetapi dipergunakan oleh organisasi seperti pemerintahan. Pemerintah harus memanfaatkan pertumbuhan teknologi informasi secara optimal, menciptakan jaringan dan alur kerja manajemen informasi serta menguatkan pemerintah bekerja secara terintegrasi dengan mempermudah akses antar unit.

Penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi pernah diteliti oleh Arisa (2019) yang mengatakan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan, namun pendapat Galuh (2020)

Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.3.3 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Provinsi Riau

Diketahui dari hasil penelitian Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Menurut Permendagri No 64 Tahun 2013 sistem akuntansi pemerintah daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terdiri atas 4 prosedur akuntansi yaitu:

1. Prosedur Akuntansi Pendapatan
2. Prosedur Akuntansi Belanja
3. Prosedur Akuntansi Asset
4. Prosedur Selain Kas

Sesuai Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019, BPK menemukan permasalahan pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai dengan ketentuan serta pengelolaan asset Pemerintah Provinsi Riau belum terkelola sepenuhnya seperti pengelolaan mobil-mobil dinas yang tidak membayar pajak dan banyak pejabat yang menguasai mobil dinas lebih dari satu. Ketiga, pengelolaan pendapatan retribusi daerah belum sepenuhnya optimal.

Penelitian mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pernah dilakukan oleh Arisa (2019) yang menyebutkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan, namun penelitian yang dilakukan oleh Firly (2019) bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara parsial variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah di SKPD Provinsi Riau
2. Secara Parsial variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di SKPD Provinsi Riau
3. Secara parsial variabel penerapan system akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di SKPD Provinsi Riau
4. Secara bersama-sama (simultan) variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan system akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah di SKPD Provinsi Riau.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi SKPD di Provinsi riau yang menjadi subjek di penelitian ini :
 - a. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi,karena dengan mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi

- b. dapat meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan system
 - c. Meningkatkan aspek penerapan system akuntansi keuangan daerah, karena dengan meningkatkan aspek tersebut dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik lagi.
2. Bagi peneliti berikutnya disarankan menambah variabel lain yang berkaitan erat secara teori terhadap variabel kualitas laporan keuangan seperti standar akuntansi pemerintah dan pengawasan keuangan daerah. Hal ini dimaksudkan agar variasi naik turunnya kualitas laporan keuangan dapat lebih dijelaskan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2014). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat
- Afandi, P. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator). Riau: Zanafa Publishing
- Agustin, Eka Galuh. 2020. Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya). Surabaya: STIESIA Surabaya
- Ariani, Arisa. 2019. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empris pada SKPD Kota Pekanbaru). Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Badrun, Firly Nahdya. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Manado: Universitas Katolik De La Salle.
- Ghozali, I (2016). Aplikasi Analisis Multivariete dengan program IBM SPSS 23 (VIII). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Firdaus, Nadirsyah, dan Fahlevi, H. 2015. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Volume 4, No. 1.
- Husna, Tissa Nurul. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan peran inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Kuenagan Pemerintah Daerah. *Jurnal. JOM Fekon*, Vol.4 No.1
- Ifa Ratifah, Mochammad Ridwan. 2012. Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, *Jurnal Trikonomika* Vol 11 No 1.
- Mahaputra dan Putra. 2014. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol:8 No:2 Tahun 2014.

- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo, 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Adi
- Mubar, Nurwira Rahayu. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja. *Artikel Ilmiah*. Makasar: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin.
- Nurillah (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Kuenagan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Pasaman Barat). *JomFEKON Vol.2 No.2 Oktober 2015*
- Pramudiarta, Rizal. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Pegawai Skpd Di Kabupaten Batang Dan Kabupaten Kendal). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pura, Rahman. 2014. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Erlangga
- Sedarmayanti, 2017. Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan Produktivitas Kerja. PT Refika Aditama. Bandung.
- Setyaningrum, D., dan Syafitri, F. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 9 No. 2*. Jakarta.
- Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2013. Auditing : Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik, Edisi Pertama, Penerbit Graha Ilmu Yogyakarta
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Manajemen. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukmaningrum. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Skripsi tidak dipublikasikan. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro

- Sunyoto, Danang, 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cet. 1, CAPS (Center For Academic Publising Service), Yogyakarta.
- Suteja, I. G. N. (2018). Analisis Kinerja Keuangan dengan Metode Altman Z-Score Pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk. Jurnal Moneter vol. v no. 1 April
- Tata Sutabri, (2014). Analisis Sistem Informasi, ANDI, Yogyakarta
- Wardani, Deni Yuwilia. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Labuhan Batu). Medan: Universitas Sumatera Utara
- Wardani, Dewi Kusuma dan Ika Andriyani. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 2. E-Issn: 2540-9646
- Winidyaningrum, Celvina, dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variable Intervening Pengendalian Intern Akuntansi: Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten. Simposium Nasional Akuntansi XII, Purwokerto.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2019. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 Tahun 2019 Riau: BPK RI.
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Perubahan Atas 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 2011, Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
- Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2005 Tentang Standarisasi Akuntansi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau